

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KALIBANDUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA PEMBAGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA KALIBANDUNG  
KECAMATAN SUNGAI RAYA  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN  
2020–2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan gender, perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan penjabaran visi dan misi Desa yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dokumen RPJM-Desa ini dipandang penting sebagai pedoman Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa enam tahun ke depan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian diatur dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan diterjemahkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dimana dalam setiap regulasi mengamanatkan bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun RPJMDesa sebagai perencanaan pembangunan untuk jangka enam (6) tahunan. Dengan demikian, penyusunan RPJMDes ini merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain dari itu, agar setiap komponen Desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan Desa, maka dalam penyusunan RPJMDes dilakukan secara partisipatif. Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan pembangunan Desa Kalibandung dapat terlaksana dengan lancar dan menyentuh kepentingan semua lapisan masyarakat yang ada.

RPJM Desa Kalibandung ini merupakan rencana strategis Desa Kalibandung untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai

dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu Pemerintahan Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya perlu untuk menyusun suatu rencana jangka menengah Desa (RPJM Desa) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Kecamatan Sungai Raya dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, internal (dalam) maupun eksternal (luar), global, dan skala prioritas. Dokumen RPJM Desa ini disusun merupakan komitmen dari Pemerintah Desa dan seluruh Perangkat Desa dalam mencapai Visi, Misi, Strategi dan Kegiatan Pemerintah Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A)
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud Penyusunan RPJMD Desa Kalibandung Tahun 2019 – 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan yang lebih terarah, efektif dan efisien untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya dan Potensi desa serta skala prioritas Permasalahan yang dihadapi di Masyarakat Desa.

2. Sebagai Dasar dan Pedoman Resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta semua elemen masyarakat yang berkepentingan dalam pembangunan Desa.

### **Tujuan**

1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kepala Desa Kalibandung dalam pelaksanaan program kegiatan yang lebih rinci berdasarkan potensi desa dan Skala prioritas pembangunan Desa
2. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa Kalibandung, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat desa dan semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

### **D. Manfaat**

Manfaat dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP-Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi,
2. Sebagai alat ukur dan Evaluasi dalam mencapai Visi, Misi, tujuan serta Sasaran Kepala Desa,
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,
4. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan,
5. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan keberlanjutan,

6. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan,
7. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.

BAB II  
PROFIL DESA

A. Sejarah Desa

Desa Kalibandung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang berdiri berdasarkan Perda Kabupaten Kubu Raya nomor 9 Tahun 2012 dengan luas wilayah ±12.000 Ha. Desa Kalibandung merupakan daerah pedesaan yang sebagian wilayahnya masih berupa hutan.

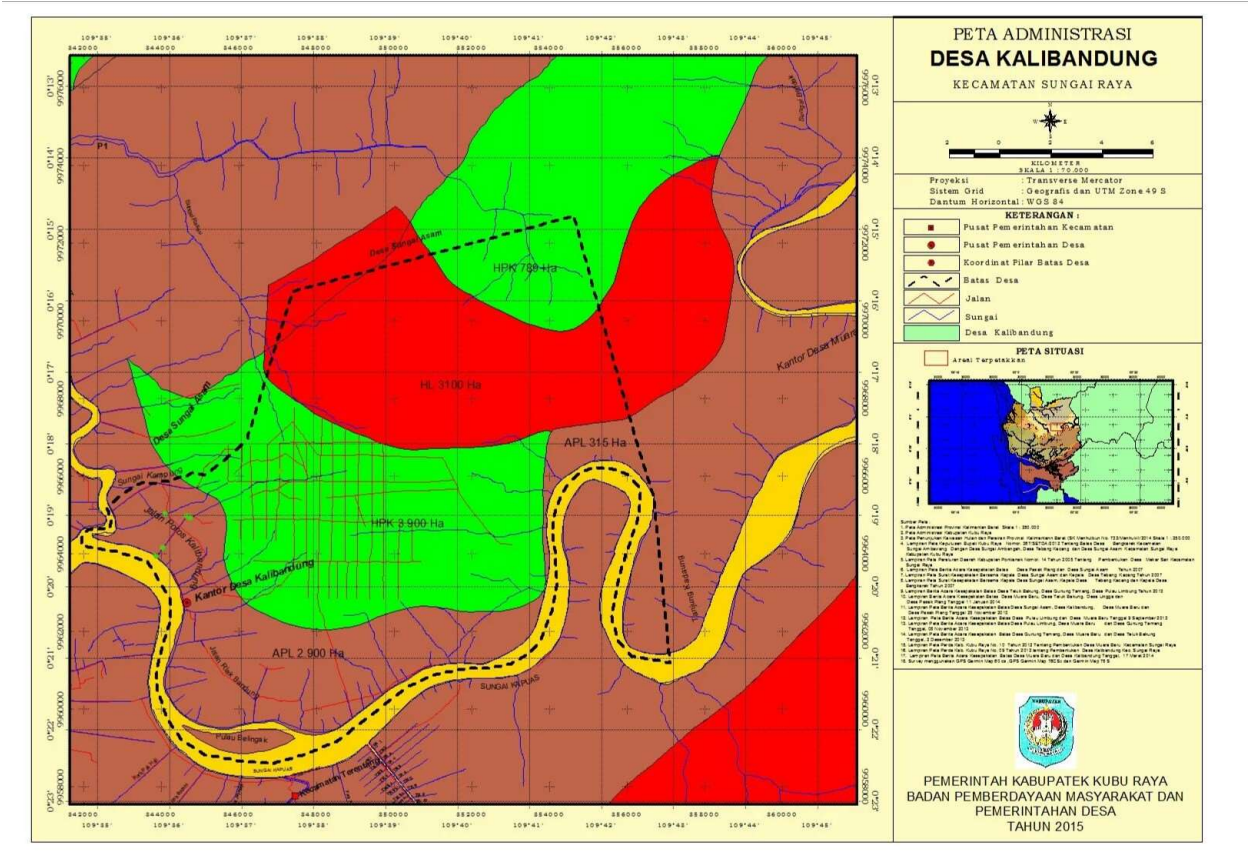
Tabel 1. NAMA KEPALA DESA KALIBANDUNG

NO	PERIODE	NAMA KADES	KETERANGAN
1.	2013-2019	Sanhaji	
2.	2019-2025	Sanhaji	

Sumber : Profil Desa Kalibandung Tahun 2020

B. Peta Desa dan Kondisi Desa

Peta Desa



**Kondisi Desa**

**a. Letak Wilayah**

Desa Kalibandung terletak di bagian Selatan Kabupaten Kubu Raya, secara administratif batas Desa Kalibandung adalah sebagai berikut :

a.	Utara berbatasan dengan desa	Pertama Jaya	Kecamatan	Sungai Raya
b.	Selatan berbatasan dengan desa	Sungai Kapuas	Kecamatan	Sungai Raya
c.	Timur berbatasan dengan desa	Muara Baru	Kecamatan	Sungai Raya
d.	Barat berbatasan dengan desa	Permata Jaya	Kecamatan	Sungai Raya

**b. Luas Wilayah**

Desa Kalibandung memiliki luas wilayah daratan ±120 Km<sup>2</sup> dimana wilayahnya sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan berstatus Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Desa Kalibandung terbagi menjadi 3 (tiga) dusun, yakni Dusun Maju Bersama, Pulau Maju dan Maju Terus. Dusun terluas adalah dusun Maju Terus.

Tabel 1  
Pembagian dusun dan Luas Wilayah

No	Nama Dusun	Luas Wilayah
1	Maju Bersama	43 KM <sup>2</sup>
2	Pulau Maju	25 KM <sup>2</sup>
3	Maju Terus	52 KM <sup>2</sup>

**c. Topografi**

Dilihat dari ketinggian tanahnya Desa Kalibandung didominasi wilayah dataran rendah, dilihat dari tekstur tanahnya sebagian besar Desa Kalibandung terdiri dari tanah gambut.

**d. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Kalibandung berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya (Kecamtan Sungai Raya Dalam Angka, 2018) berjumlah 2.123 jiwa yang terdiri dari 1.066 laki laki dan 1.057 perempuan. Sedangkan Jumlah penduduk berdasarkan usia adalah sebagai berikut :



Tabel 2  
Jumlah penduduk Menurut Usia

a.	0 - 6 tahun	:	165	orang
	7 - 12 tahun	:	444	orang
	13 - 18 tahun	:	432	orang
	19 - 24 tahun	:	497	orang
	25 - 55 tahun	:	540	orang
	56 - 79 tahun	:	38	orang
	80 tahun ke atas	:	7	orang

Sumber: Profil Desa Kalibandung, 2018.

Sebagian besar penduduk Desa Kalibandung bekerja pada sektor Pertanian dan Perkebunan secara detail mata pencarian penduduk Desa Kalibandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3  
Mata Pencarian Penduduk

1.	Petani			
	- Petani Pemilik Tanah	:	93	orang
	- Petani Penggarap Tanah	:	9	orang
	- Buruh Tani	:	567	orang
2.	Nelayan	:	3	orang
3.	Pengusaha Sedang/Besar	:	4	orang
4.	Pengrajin/Industri Kecil	:	2	orang
5.	Buruh Industri	:	27	orang
6.	Buruh Bangunan	:	107	orang
7.	Buruh Pertambangan	:	25	orang
8.	Buruh Perkebunan	:	43	orang
9.	Pedagang	:	24	orang
10.	Pengangkutan	:	18	orang
11.	Pegawai Negeri Sipil	:	2	orang
12.	ABRI/POLRI	:	0	orang

13. Pensiunan (ABRI/PNS/POLRI)	: 1	orang
14. Peternak		
a. Sapi Perah	: 0	orang
b. Sapi biasa	: 12	orang
d. Kambing	: 11	orang
g. Ayam	: 6	orang
h. Itik	: 0	orang
i. Peternak lainnya	: 46	orang
15. Lain – lain	: 0	orang

**e. Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa Kalibandung masih terdapat 55 % perempuan yang belum tamat SD dan 35 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 0,01 % untuk perempuan dan 0,1 % untuk laki-laki.

Tabel 4.  
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	147	123
Tamat SD/MIN	87	58
Tamat SLTP/MTS	149	101
Tamat SMU/MAN	94	110
Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	6	8

*Sumber data profil desa tahun 2019*

**f. Kesehatan.**

Beberapa Indikator Penting Bidang Kesehatan Desa Kalibandung.

**Tabel 5**  
**Indikator Kesehatan**

Uraian	2017	2018	2019
Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi	3	2	3
Angka Kematian Ibu Melahirkan	0	1	0
Cakupan Imunisasi	326	334	329
Balita Gizi Buruk	6	5	5

*Sumber data profil desa tahun 2019*

**g. Infrastruktur Dasar dan Pemukiman**

**Tabel 6**  
**Kondisi Insprastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

NO	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		BAIK	RUSAK	
1	<b>Jalan Desa</b>			
	Aspal			0 Km
	Rabat Beton	5 Km	3 Km	8 Km
	Tanah	3 Km	6 Km	9 Km
	Sirtu			0 Km
2	<b>Jalan Lingkungan</b>			
	Aspal			0 Km
	Rabat Beton	2 Km	1 Km	3 Km
	Tanah		5 Km	5 Km
	Sirtu			0 Km
3	Jembatan Desa	260 M	100 M	360 M
4	Prasarana Jalan			0 Km
	Gorong gorong			0 Km
	Selokan			0 Km
	Drainase			0 Km

*Sumber data desa tahun 2019*

Tabel 7  
Kondisi Insfrastruktur Kawasan Pemukiman

No	Uraian	2018	2019
1	Rumah Tidak Sehat	57	49
2	Rumah Tidak layak Huni	37	28
3	Sumber air bersih Milik Desa	0	0
4	Sumur Bor	0	0
5	Pipanisasi	0	0
6	PDAM	0	0

*Sumber data Profil desa tahun 2019*

#### **h. Kemiskinan**

Menurut sumber data dari BPS tahun 2019 jumlah KK miskin di Desa Kalibandung adalah mencapai 40 % yang tersebar di 3 dusun. Dusun yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Dusun Pulau Maju dengan prosentase 10 % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Dusun Maju Bersama dengan persentase 17 %.

Tabel 8  
Sebaran Kemiskinan

No	DUSUN	Prosentase Kemiskinan	Karakteristik wilayah
1	Maju Bersama	17	Perkebunan
2	Pulau Maju	10	Pertanian
3	Maju Terus	13	Perkebunan

#### **i. Keadaan Sosial**

Sebagian besar penduduknya merupakan Suku Melayu, Suku Dayak, Suku Madura, dan Suku Jawa Pemeluk Agama yang terbesar adalah Pemeluk Agama Islam dan Kristen.

Pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada jaman modern namun tak lepas dari Adat Istiadat yang turun temurun dari nenek moyang. Adat istiadat ini masih dipertahankan hingga kini walaupun banyak pengaruh terutama dari mudahnya informasi yang didapat dari Televisi maupun pergaulan masyarakat sehari-hari ditambah lagi dengan letak Desa Kalibandung yang pembangunan infrastrukturnya sangat cepat khususnya di bidang akses transportasi, sehingga

memudahkan penduduk untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk menopang keberlangsungan hidupnya dengan cara-cara modern seperti saat ini.

Kondisi tempat tinggal/perumahan penduduk pada umumnya cukup mampu, namun masih ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya dibawah standar layak huni.

#### **j. Keadaan Ekonomi**

Sebagian besar perekonomian desa bertumpu pada sektor Pertanian dan pada umumnya berpenghasilan sedang yaitu diatas rata-rata pendapatan perkapita nasional. Mata pencaharian yang sebahagian besar dari sektor pertanian dan perkebunan serta perikanan.

Adapun kondisi pertanian dan komoditi yang menjadi unggulan di Desa Kalibandung adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian
  - a. Ladang Tadah Hujan
  - b. Sawah
- b. Perkebunan
  - a. Karet
  - b. Kelapa Sawit
  - c. Holticultura
  - d. Lada
- c. Perikanan
  - a. Keramba kolam terpal
  - b. Budi daya ikan air tawar
  - c. Nelayan air tawar
  - d. Keramba apung

C. Kelembagaan Desa

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Tabel 9

Data Perangkat Desa

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	AGAMA	PENDIDIKAN
1	Sanhaji	L	Kepala Desa	Islam	SMA
2	Syahroni	L	Sekretaris Desa	Islam	S1
3	Hamidah	P	Kaur	Islam	S1
4	Natalius	L	Kaur	Kristen	SMA
5	Asmadi	L	Kasi	Islam	SMA
6	Sahrani	L	Kasi	Islam	SMA
7	M. Nasirullah	L	Kadus Maju Bersama	Islam	S1
8	Totok Sumnto	L	Kadus Pulau Maju	Islam	SMP
9	Arif Budianto	L	Kadus Maju Terus	Islam	SMA

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tabel 10  
 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibandung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	AGAMA	PENDIDIKAN
1	Benny	L	Ketua	Kristen	SMA
2	Ach. Gozali	L	Wakil Ketua	Islam	SMA
3	Sahruliansyah	L	Sekretaris	Islam	SMA
4	Herianto	L	Anggota	Islam	SMA
5	Yohanes	L	Anggota	Kristen	SMA
6	Anita	L	Anggota	Kristen	SMA
7	Angelia Yasinta	L	Anggota	Kristen	SMA

**c. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk atas prakarsa yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Tabel 11  
 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Rukun Tetangga RT)	19	19	0
2	Rukun Warga (RW)	6	6	0
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12	0	12
4	Kader Posyandu	25	3	22
5	Karang Taruna	6	5	1
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	5	5	0

	(LPM)			
7	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	1	1	0
8	Kader Pembangunan Manusia	1	0	1

**d. Lembaga Adat Desa**

Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Tabel 12  
Nama Anggota Lembaga Adat Desa Kalibandung

No	Nama	Jabatan
1	Adrianus Anai	Ketua
2	Ayub	Sekretaris
3	Udin	Anggota
4	Oges	Anggota
5	Robet Susana	Anggota
6	Pilipus Ilu	Anggota

**D. Dinamika Konflik**

Konflik merupakan fenomena sosial yang pasti terjadi di masyarakat. Konflik terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai atau tujuan yang disertai ancaman atau kekerasan sehingga menyebabkan kondisi tidak nyaman baik antar individu maupun antar kelompok, terdapat suatu ketidak sesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersebunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

Konflik yang pernah terjadi di Desa Teluk Kalibandung :

1. Laporan mengenai adanya perkelahian disebabkan salah paham,
2. Konflik mengenai rencana Pembangunan Badan Jalan Makam Parit Sangkar Dunia Desa Kalibandung,
3. Konflik mengenai titik-titik pembangunan Desa.

konflik terkait kebijakan yang mungkin menyebabkan salah satu pihak tidak puas terhadap suatu keputusan, namun hal ini tidak berlangsung lama dan dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga



semua bisa selesai tanpa ada masalah berkelanjutan, beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan konflik di Desa Kalibandung :

1. Adanya aspirasi yang tidak ditampung,
2. Ketergantungan satu arah,
3. Ketidakpuasan, perasaan ketidakadilan,
4. Distorsi komunikasi,
5. Adanya provokator,
6. Toleransi rendah,
7. Persaingan,
8. Aturan yang kurang jelas,
9. Kurang transparannya beberapa hal,
10. Kesenjangan Ekonomi,
11. Isu sara,
12. Isu politik,
13. Pembangunan tidak merata,
14. Rendahnya tingkat pendidikan.

**BAB III**  
**POTENSI DAN MASALAH**

**A. Potensi yang ada di desa**

Potensi Desa Kalibandung cukup besar baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik sumber daya alam ,sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat.

Secara umum potensi Desa Kalibandung dapat dideskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung saling terkait satu sama lain sebagai mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Potensi Sumber Daya Alam

Tabel 13  
Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Hutan Desa	7.255	Ha
2	Sungai	15	Km
3	Lahan Pertanian	358	Ha
4	Perkebunan	607	Ha
5	Pasir	500.000	Kubik

b. Potensi Sumber Manusia

Tabel .14  
Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
<b>1</b>	<b>Data Penduduk</b>		
	Kepala Keluarga	576	KK
	Jumlah penduduk Laki-laki	1126	Orang
	Jumlah penduduk perempuan	987	Orang
<b>2</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>		
	Lulusan SD/MI	145	Orang
	Lulusan SLTP/MTS	250	Orang
	Lulusan SLTA/MA	204	Orang
	S1/Diploma	14	Orang
	Putus sekolah	98	Orang

	Buta Huruf	270	Orang
<b>3</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>		
	Petani	102	Orang
	Petani Pemilik Tanah	93	Orang
	Petani Penggarap Tanah	9	Orang
	Buruh Tani	0	Orang
	Nelayan	3	Orang
	Pengusaha Sedang/Besar	4	Orang
	Pengrajin/Industri Kecil	2	Orang
	Buruh Industri	27	Orang
	Buruh Bangunan	107	Orang
	Buruh Pertambangan	25	Orang
	Buruh Perkebunan	43	Orang
	Pedagang	24	Orang
	Pengangkutan	18	Orang
	Pegawai Negeri Sipil	2	Orang
	ABRI/POLRI	0	Orang
	Pensiunan (ABRI/PNS/POLRI)	1	Orang
	Peternak		
	a. Sapi Perah	0	Orang
	b. Sapi biasa	12	Orang
	d. Kambing	11	Orang
	g. Ayam	6	Orang
	h. Itik	0	Orang
	i. Peternak lainnya	46	Orang

c. Potensi Sumber Pembangunan

Tabel 14.

Potensi Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan Desa	49,8	Km
	b. Jalan Lingkungan	50	Km
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit

	b. Gedung TK	-	-
	c. Gedung SD	4	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	-	-
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	5	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	-	-
	d. Sarana Air Bersih	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	-
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	-
	c. Galeri	-	-
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	2	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	1	Kelompok

d. Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya

Tabel 15

Potensi Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong Royong	19	RT
2	Tradisi Ruwahan	5	Pekan
3	Pesta Rakyat (Panen Raya)	1	Pekan
4	Bersih Desa (Ruwat Bumi)	2	Pekan
5	Naik Dango	2	Pekan
6	Dan Lain-lain	1	Kegiatan

**B. Permasalahan Desa**

Permasalahan merupakan pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan sesuatu yang diharapkan. Dalam perspektif pembangunan, permasalahan dapat diterjemahkan sebagai suatu perbedaan antara kinerja yang ditargetkan dengan kenyataan pencapaian yang sebenarnya. Secara umum permasalahan dapat di kelompok sebagai berikut :

- a. Permasalahan dengan melihat kondisi umum desa terhadap pencapaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan , yang belum dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan dari periode sebelumnya.
- b. Permasalahan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa yakni:
  - Bidang Pemerintahan Desa
  - Bidang Pembangunan Desa
  - Bidang Pembinaan Masyarakat
  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak

Dalam menyusun program pembangunan desa Kalibandung, perlu diketahui peta permasalahan dan potensi di wilayah (Dusun) Desa Kalibandung. Dengan diketahuinya peta permasalahan dan potensi, maka program pembangunan desa Kalibandung disusun dengan menjabarkan langkah langkah pelaksanaan visi dan misi RPJM desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, aturan dan regulasi yang berlaku, kondisi, masalah dan potensi serta kemampuan desa, dan penentuan prioritas program yang disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan, sehingga dapat dirumuskan skala prioritas penanganan masalah dan pilihan-pilihan tindakan.

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun yang telah rekapitulasi berdasar kelompok bidang dan pemeringkatan masalah serta telah disepakati tindakan yang layak untuk mengatasi permasalahan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa di setiap dusun dengan menggunakan alat bantu "sketsa desa", "kalender musim" dan "bagan kelembagaan", maka masalah, penyebab masalah dan potensi yang ada di desa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**a. Pengelompokan masalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Tabel 16  
 Pengelompokan masalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi
1	<b>1. BIDANG PEMERINTAHAN DESA</b>		
	Penyelenggaraan Belanja Siltap,		

	Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	Terlambat dalam penyaluran siltap dan tunjangan	Belum selesainya laporan sebagai acuan penyaluran dana	Perangkat Desa, BPD, RT, dan RW
2	Siltap perangkat tambahan tidak sama dengan honor staff	Peraturan	Perangkat desa
3	Siltap pembantu desa tidak optimal	Peraturan	Pembantu desa
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
4	Pembangunan Kantor Desa	Kantor Desa yang belum selesai	Terciptanya pelayanan yang maksimal
5	Kurangnya kesejahteraan staff	Gaji yang kecil	Staff
6	Tata kelola administrasi desa belum optimal	Belum adanya tempat penyimpanan arsip desa	Sdm, ruangan
7	Kantor BPD belum ada	Tidak ada tanah kas desa	Lahan, aparatur, pemanfaat
8	Kantor LPM belum ada	Tidak ada tanah kas desa	Lahan, aparatur, pemanfaat
9	Kantor Desa belum memiliki WIFI	Tidak ada bantuan dari pemerintah	Pemanfaat, Aparatur, masyarakat
10	Kurangnya jaringan Internet di desa	Akses Telkom tidak ada	Pemanfaat, Aparatur, masyarakat
11	Staff masih membutuhkan peningkatan kapasitas	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas	Perangkat Desa
12	Staff belum memiliki kendaraan dinas	Staff belum memiliki kendaraan dinas	Perangkat Desa
13	Babinkamtibas belum memiliki sekretariat sendiri	Tidak ada tanah kas desa	Anggota, anggaran
14	Kantor belum memiliki pagar	Belum pernah dirancang	Lokasi ,tenaga kerja,
15	Kantor belum memiliki gapura	Belum pernah dirancang	Lokasi ,tenaga kerja,
16	Kantor Desa belum memiliki tempat parkir	Kantor Desa belum memiliki tempat parkir	Pemanfaat
17	Kantor Desa belum memiliki Kantin	Kantor Desa belum memiliki Kantin	Pemanfaat
18	Kantor Desa belum memiliki tenaga surya	Kurangnya bantuan	Pemanfaat
19	Kurangnya GPS	Kurangnya GPS	Anggota MPA, Pemanfaat
20	Gedung PKK belum ada	Tidak ad tanah kas desa	Lahan, anggota PKK
21	Gedung BUMDES belum ada	Tidak ad tanah kas desa	Lahan,pemanfaat
22	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang	Kurangnya peningkatan	Masyarakat, gapoktan

	pertanian	kapasitas poktan	
23	BPD belum memiliki seragam	Keterbatasa anggaran	Anggota
24	Kantor BPD belum memiliki papan nama	Keterbatasa anggaran	Kantor
25	BPD belum memiliki kendaraan operasional	Keterbatasa anggaran	Pemanfaat
26	Kantor LPM belum memiliki mobeler	Keterbatasa anggaran	Kantor, pemanfaat
27	LPM belum memiliki seragam	Keterbatasa anggaran	Anggota
28	Kantor LPM belum memiliki papan nama	Kantor LPM belum memiliki papan nama	Kantor
29	Sepanjang sungai Desa belum memiliki tanggul	Keterbatasan anggaran	Lokasi, pemanfaat
30	RT RW desa belum maksimal	Peningkatan Kapasitas	Peta desa, Lokasi
31	Pengetahuan aparatur masih kurang	Peningkatan Kapasitas	Aparatur , Badan , dan lembaga Desa
32	Taman kantor Desa belum ada	Kurangnya tenaga ahli dan tidak ada tanah kas desa	Kantor, pemanfaat
33	Tidak adanya papan informasi di Kantor Desa	Kurangnya inovatif	Aparatur , Badan , dan lembaga Desa
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
34	Kelengkapan data penduduk belum lengkap seperti KK dan KTP.	Kurangnya pemahaman tentang data penduduk serta belum didata secara lengkap	Ketua wilayah RT, Kaur , dan Anggaran
35	Data profil desa belum akurat	Penyampaian data dari tingkat RT yang belum pas	LPM, RT, dan Anggaran
36	Data base kelompok miskin tidak update dengan kondisi terkini	data kelompok miskin tidak lengkap	Perangkat desa,RT,LPM,Anggaran
37	Data base prodeskel tidak update	Belum terlatih dalam pengimputan ke prodeskel	Perangkat desa
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
38	Kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan rapat desa dan musdes	Masyarakat tidak menghiraukan undangan karena sibuk bekerja	Masyarakat
39	Terlambatnya penyusunan dokumen RKPDes, APBDes, dan	Penyusunan rencana kerja yang kurang disiplin	Pendampingan

	Pelaporan Tahunan		
40	Pemberitahuan yang kurang jelas dari Pemerintah desa	Papan informasi dibuat hanya untuk daerah tertentu saja	Aparat Desa, Masyarakat, LPM, BPD dan Lembaga Lainnya
	Pertanahan		
41	Kepengurusan PBB yang tidak terkoordinir	Tidak ada petugas pemungut iuran PBB	Perangkat desa
42	Sertifikat belum dimiliki oleh semua masyarakat	Belum terkaper semua oleh BPN	Petugas BPN

**b. Pengelompokan Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Tabel 17.

Pengelompokan Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan

	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi
<b>2</b>	<b>2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>		
	<b>Bidang Pendidikan</b>		
1	Kurangnya keaktifan tenaga pengajar	Tenaga pengajar tinggal jauh dari sekolah	Guru, Murid
2	Tenaga Pengajar PAUD/TK tidak mendapatkan honor	Kurangnya perhatian pemerintah	Guru Paud/TK
3	Masih kurangnya bangunan Gedung PAUD Milik Desa	Jumlah anak usia dini tidak tertampung oleh PAUD yang ada di desa	Tanah Desa, Tenaga Kerja, Material Lokal, Guru PAUD
4	Masih Kurangnya Tenaga Pengajar PAUD yang bersertifikasi	Pelaksanaan Sertifikasi dan Pemenuhan biaya sertifikasi	Guru PAUD
5	Masih Kurangnya Alat Peraga Edukatif	APE yang ada sudah Rusak dan tidak Memadai	Gedung PAUD, Guru PAUD,Anggaran
6	Kurangnya Budaya Membaca	Belum ada bangunan Perpustakaan Desa	Lahan, Buku bacaan, Anggaran
7	Belum Optimalnya kegiatan sanggar seni dan belajar masyarakat	Belum adanya tempat/bangunan untuk berkegiatan	Lahan, SDM, Anggaran
8	Banyak siswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan	Tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan/operasional untuk sekolah	Anggaran, Siswa berprestasi
	<b>Bidang Kesehatan</b>		
9	Kurangnya Tenaga medis	Tenaga medis yang kurang	Bidan,kader posyandu
10	Sarana Posyandu belum lengkap	Keterbatasan Anggaran	Tenaga medis, kader, balita dan ibu hamil ada
11	Pompong khusus untuk membawa orang sakit belum ada	Keterbatasan Anggaran	Pemanfaat ada
12	Sound system posyandu belum ada	Keterbatasan Anggaran	Pemanfaat ada



13	Peralatan PMT belum lengkap	Keterbatasan Anggaran	Pemanfaat ada
14	Tidak terupdatenya data Balita Sehat, Balita kurang Gizi	Belum Optimalnya Pendataan Balita sehat, balita kurang gizi	PKK Desa, Kader Posyandu, KPM, Posyandu
15	Masih ada kejadian Balita yang Kurang Gizi	Pemberian Makanan Tambahan Belum memenuhi Kebutuhan Gizi Balita	PKK Desa, Posyandu, Kader, Hasil pertanian yang berlimpah
16	Warga masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat	Masih kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan	Kader Posyandu, PKK, Anggaran, Tenaga Kesehatan
17	Ambulan Desa	Belum Optimalnya pembiayaan untuk Operasional Ambulan desa	Ambulance Desa, Anggaran
18	Banyak jenis tanaman Obat dapat dijadikan obat	Belum membudayanya penyediaan tanaman Obat tradisional	PKK Desa, Posyandu, Kader Posyandu, Anggaran
19	Pelayanan Posyandu belum Optimal	Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana posyandu	PKK Desa, Posyandu, Kader Posyandu, Anggaran
20	Obat-obatan gratis kurang	- Pengadaan KB Gratis - Pengadaan KB Murah	Masyarakat
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
	<b>Jalan Desa</b>		
21	Rabat Beton Jalan Poros Desa Rusak	Belum terakomodir dengan baik	DD, APBD
22	Aspal Jalan Poros Desa	Belum adanya jalan aspal	DD, APBD
23	Jalan sempit	Susahnya ketika bersimpangan	DD, APBD
24	Tepian jalan semak belukar	Tidak jelas pandangan pengguna kendaraan	DD, APBD
	<b>Jalan Lingkungan</b>		
25	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Pembangunan yang masih belum merata	Semen, Pasir, Batu, Pkrja
26	Jalan Sempit	Susahnya ketika bersimpangan	Semen, Pasir, Batu, Pkrja
	<b>Jalan Usaha Tani</b>		
27	Jalan usaha tani belum merata	Masih minimnya dana untuk pembuatan Pembangunan jalan	Semen, Pasir, Batu, Pkrja
	<b>Jembatan Desa</b>		
28	Jembatan Desa Belum Terbangun	Belum Semua jembatan desa terbangun	Semen, Pasir, Batu, Pkrja
	<b>Balai Desa</b>		
29	Balai Desa	Belum terbangunnya Balai Desa	DD, ADD, APBD
	<b>Pemakaman Milik Desa/ Situs bersejarah</b>		
30	Situs Bersejarah	Masih belum terurus	Petugas Makam, RT,

		dengan baik	RW
	<b>Embung Desa</b>		
31	Lahan pertanian pada musim kemarau kekurangan air	Minimnya Dana untuk membangun embung desa	DD, APBD
	<b>Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Tembok penahan Tanah</b>		
32	Terjadi genangan air di saat musim penghujan di Dusun Pulau Maju	Belum semua parit dan irigasi dibuatkan Gorong-gorong	DD, APBD
33	Parit kampung yang masih sering sumbat saat musim penghujan	Belum Teranggarkan	DD, APBD
	<b>Peta wilayah Desa</b>		
34	Belum adanya batas wilayah desa	Peta wilayah desa belum akurat	Pemetaan, Kasi, Kaur
	<b>Tata Ruang Desa</b>		
35	Masih tumpang tindihnya pengembangan wilayah desa	Desa belum ada master plan peruntukan pengembangan wilayah desa yang mengacu dengan tata ruang kabupaten	Keanekaragaman Usaha pertanian Masyarakat, Perkembangan Jumlah Penduduk
	<b>Kawasan Pemukiman</b>		
	<b>Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)</b>		
36	Masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mempunyai tempat tinggal yang layak	Belum ada pendataan rumah tidak layak huni	Perangkat desa, Anggaran
	<b>Penyediaan Air Bersih bagi masyarakat</b>		
37	Penyediaan Air Bersih	Tidak semua masyarakat desa menikmati sarana air bersih	DD, ADD, APBD
	<b>Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)</b>		
38	Parit lingkungan tersumbat	Belum adanya penganggaran untuk saniatsi pemukiman	DD, ADD, APBD
	<b>Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll</b>		
39	Masih banyak	Dana yang minim	DD, ADD, APBD

	masyarakat buang ari besar (BAB) dengan cara menugal	sehingga belum bisa deianngarkan	
	<b>Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)</b>		
40	Masyarakat masih banyak membuang sampah ke sungai	Tidak tersedianya tempat pengelolaan sampah	Tata Ruang, Pemdes, Masyarakat
	<b>Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)</b>		
41	Tidak ada pembuangan air limbah	Belum teranggarkan	DD, APBD
	<b>Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa</b>		
42	Belum adanya taman bermain anak	Belum teranggarkan	DD, APBD
	<b>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>		
43	LPHD	Kurangnya pendanaan untuk penunjang kegiatan LPHD	LPHD, Masyarakat
	<b>Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		
44	Internet Desa	Tidak tersedianya jaringan internet desa	Pemdes
45	Website Desa Belum Maksimal	Kapasitas pengelola yang belum mumpuni	Perangkat Desa
46	Masih banyak masyarakat desa yang ke sasar untuk menuju ke pusat desa	Tidak adanya rambu rambu jalan menuju desa	SDM, Alat, Anggaran
47	Masyarakat belum banyak yang mengetahui hasil kegiatan pemdes	Belum efisien dan optimal pemberian informasi kemasyarakat ttg perencanaan kegiatan dan anggaran serta hasil pelaksanaan pembangunan desa	SDM, Alat, Anggaran
	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
48	Penerangan/ PLN	Sebagian wilayah Desa Kalibandung belum mendapatkan aliran listrik	DD dan APBD Kabupaten/Daerah
49	Air Bersih	Belum adanya sarana ari bersih	DD dan APBD Kabupaten/Daerah
	<b>Pariwisata</b>		
50	Wisata Religi	Tidak adanya akses	DD dan APBD

		jalan ke tempat wisata	Kabupaten/Daerah
51	Tempat Pemancingan	Tidak adanya fasilitas	DD, BUMDes

c.
Pengelompokan Masalah Bidang Pembinaa Masyarakat

Tabel 18  
Pengelompokan Bidang Pembinaan Masyarakat

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
No	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		
1	Belum Optimalnya peran dan fungsi Satlimas di desa	Kurangnya kapasitas Satlimas dalam pemahaman tugas dan fungsi	Satlimas, Babinkamtibmas, Babinsa, Anggaran
2	Tidak adanya Ronda malam di Desa	Belum ada penjadwalan ronda malam, tidak ada Pos Ronda	Lahan, SDM, Alat, Anggaran
3	Masih banyak terjadi kenakalan Remaja	Kurangnya sosialisasi tentang hukum dan perlindungan masyarakat	Satlimas, Babinkamtibmas, Babinsa, Anggaran
	<b>KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN</b>		
4	Adat Istiadat	Kurangnya penunjang Kegiatan adat budaya lokal	Masyrakat adat
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>		
5	Karang Taruna	Kurangnya Pelatihan Pengkaderan karang taruna	Karang Taruna
6	Stadium bola	Belum adanya tribun panitia dan penonton	Lahan ,SDM,Alat, Anggaran
	<b>KELEMBAGAAN MASYARAKAT</b>		
7	Belum Optimalnya Peran Kelembagaan yang ada di desa	Kelembagaan yang ada didesa kurang memahami Tugas dan fungsi	SDM, Kelembagaan Masy,Desa, Kecamatan, Anggaran

c.
Pengelompokan Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tebel 19  
Pengelompokan Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
No	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
1	Perikanan air tawar	Kurangnya modal untuk pengembangan potensi perikanan air	Dinas, Pemdes

		tawar	
2	Masyarakat sulit untuk membeli ikan krn harus menunggu pedagang keliling	Tidak adanya penjual ikan di desa	Lahan, SDM, PPL, Anggaran
	<b>Pertanian dan Perternakan</b>		
3	Pertanian padi unggul	Belum dilaksanakan kegiatan pertanian dengan program padi unggul	Pemdes, Petani
4	Kelompok Tani kurang maksimal	Tidak adanya peremajaan dan peningkat kapasitas kelompok tani	SDM, Lahan, PPL
	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>		
5	Staf desa	Kurangnya pemahaman tentang tata cara pengelolaan desa	Aparat Desa
6	Beberapa Anggota BPD desa belum melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya	Belum memahami akan tugas dan fungsinya	BPD,Aparatur kec, Bahan Bacaan
7	RT, RW	Kurangnya kinerja pengurus RT, RW	RT, RW
	<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>		
8	PKK	Kurangnya Penunjang kegiatan pkk	PKK, Kelompok Perempuan
9	Kelompok pengrajin	Tidak ada penunjang yang tepat untuk kelompok pengrajin	Kelompok Pengrajin
	<b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>		
10	BUMDES	Program pencanangan kegiatan bumdes yang belum sesuai dengan aturan koperasi	BUMDES, anggota
	<b>Dukungan Penanaman Modal</b>		
11	Dukungan koperasi	Koperasi yang dibentuk hanya berjalan ditempat	Anggota koperasi
	<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>		
12	Industri kerajinan rumah tangga	Tidak ada penganggaran untuk kegiatan industri rumah tangga	Pengrajin

Penentuan Tindakan yang layak.

a. Alternatif tindakan pemecahan masalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Tebel 20  
Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah Penyelenggaraan Pemerintah

No	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	<b>1. BIDANG PEMERINTAHAN DESA</b>				
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	Terlambat dalam penyaluran siltap dan tunjangan	Keterlambatan laporan	Perangkat Desa, BPD, RT, dan RW	Perketat kedisiplinan dalam bertugas	Perketat kedisiplinan dalam bertugas
2	Siltap perangkat tambahan tidak sama dengan honor staff	Peraturan	Perangkat desa	Tmbah honor	Tambah honor
3	Siltap pembantu desa tidak optimal	Terbatasnya anggaran desa	Pembantu desa	Penambahan honor	Penambahan honor
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				
4	Pembangunan Kantor Desa	Kantor Desa yang belum selesai	Terciptanya pelayanan yang maksimal	Rehab Kantor Desa	Rehab Kantor Desa
5	Kurangnya kesejahteraan staff	Gaji yang kecil	Staff	Penambahan Gaji	Penambahan Gaji
6	Tata kelola administrasi desa belum optimal	Belum adanya tempat penyimpanan arsip desa	Sdm, ruangan	Penambahan lemari Arsip	Penambahan lemari Arsip
7	Kantor BPD belum ada	Tidak ada tanah kas desa	Lahan, aparatur, pemanfaatan	Kantor BPD Lengkap	Pembangunan Kantor BPD Lengkap
8	Kantor LPM belum ada	Tidak ada tanah kas desa	Lahan, aparatur, pemanfaatan	Kantor LPM Lengkp	Pembangunan Kantor LPM

					Lengkap
9	Kantor Desa belum memiliki WIFI	Tidak ada bantuan dari pemerintah	Pemanfaat, Aparatur, masyarakat	WIFI Lengkap	WIFI Lengkap Desa
10	Kurangnya jaringan Internet di desa	Akses Telkom tidak ada	Pem anfa at, Apar atur, masy arak at	V-sat	Tower Internet
11	Staff masih membutuhkan peningkatan kapasitas	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas	Perangkat Desa	Peningkatan Kapasitas Staff Desa	Peningka tan Kapasita s Staff Desa
12	Staff belum memiliki kendaraan dinas	Staff belum memiliki kendaraan dinas	Perangkat Desa	Pengadaan Kendaraan Dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas Desa
13	Babinkamtib mas belum memiliki sekretariat sendiri	Tidak ada tanah kas desa	Anggota, anggaran	Pembangun an Sekretariat Kapolpos/B abinkamtib mas	Pembangun an Sekretariat Kapolpos/B abink amtibmas
14	Kantor belum memiliki pagar	Belum pernah dirancang	Lokasi ,tenaga kerja,	Pagar Kantor Desa	Pagar Kantor Desa
15	Kantor belum memiliki gapura	Belum pernah dirancang	Lokasi ,tenaga kerja,	Gapura Kantor Desa	Gapura Kantor Desa
16	Kantor Desa belum memiliki tempat parkir	Kantor Desa belum memiliki tempat parkir	Pemanfaat	Tempat Parkir Kantor 5 x 15 M	Tempat Parkir Kantor Desa 5 x 15 M
17	Kantor Desa belum memiliki Kantin	Kantor Desa belum memiliki Kantin	Pemanfaat	Kantin Kantor Desa	Kantin Kantor Desa
18	Kantor Desa belum memiliki tenaga surya	Kurangnya bantuan	Pemanfaat	Tenaga Surya Lengkap	Tenaga Surya Lengkap Desa
19	Kurangnya GPS	Kurangnya GPS	Anggota MPA, Pemanfaat	GPS 10 Unit	GPS 10 Unit Desa
20	Gedung PKK belum ada	Tidak ad tanah kas desa	Lahan, anggota PKK	Gedung PKK 7 x 8M	Gedung PKK 7 x 8 M

					Desa
21	Gedung BUMDES belum ada	Tidak ad tanah kas desa	Lahan,pema nfaat	Gedung BUMDES7 x 8 M	Gedung BUMDES 7 x 8M
22	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pertanian	Kurangnya peningkatan kapasitas poktan	Masyarakat, gapoktan	Pelatihan Pembibitan Karet dan Padi unggul	Pelatihan Pembibitan Karet dan Padi unggul
23	BPD belum memiliki seragam	Keterbatasa anggaran	Anggota	Pakaian Seragam 3 Stel anggota BPD	Pakaian Seragam 3 Stel anggota BPD
24	Kantor BPD belum memiliki papan nama	Keterbatasa anggaran	Kantor	Papan Nama Permanen Kantor BPD	Papan Nama Permanen Kantor BPD
25	BPD belum memiliki kendaraan operasional	Keterbatasa anggaran	Pemanfaat	Kendaraan Operasiona l BPD	Kendaraan Operasion al BPD
26	Kantor LPM belum memiliki mobeler	Keterbatasa anggaran	Kantor, pemanfaat	Mobeler Kantor LPM	Mobeler Kantor LPM
27	LPM belum memiliki seragam	Keterbatasa anggaran	Anggota	Pakaian Seragam 3	Pakaian Seragam 3 Stel LPM
28	Kantor LPM belum memiliki papan nama	Kantor LPM belum memiliki papan nama	Kantor	Papan Nama Permanen Kantor LPM	Papan Nama Permanen Kantor LPM
29	Sepanjang sungai Desa belum memiliki tanggul	Keterbatasan anggaran	Lokasi, pemanfaat	Tanggul Sepanjang Sungai Desa Kalibandu ng	Tanggul Sepanjang Sungai Desa Kalibandu ng
30	RT RW desa belum maksimal	Peningkatan Kapasitas	Peta desa, Lokasi	Anggaran penyusuna n RT RW Desa	Anggaran penyusuna n RT RW Desa
31	Pengetahuan aparatur masih kurang	Peningkatan Kapasitas	Aparatur , Badan , dan lembaga Desa	Pelatihan	Pelatihan
32	Taman kantor Desa belum ada	Kurangnya tenaga ahli dan tidak ada tanah kas desa	Kantor, pemanfaat	Mencari tanah hibah	Mencari tanah hibah
33	Tidak adanya	Kurangnya	Aparatur ,	Memcari	Memcari



	papan informasi di Kantor Desa	inovatif	BPD , dan lembaga Desa	dan membuat papan informasi	dan membuat papan informasi
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
34	Kelengkapan data penduduk belum lengkap seperti KK dan KTP.	Kurangnya pemahaman tentang data penduduk serta belum didata secara lengkap	Ketua wilayah RT, Kaur , dan Anggaran	Pendataan Penduduk wajib KTP	Pendataan Penduduk wajib KTP
35	Data profil desa belum akurat	Penyampaian data dari tingkat RT yang belum pas	RT, dan Anggaran	Inventarisasi data Propil desa dan input di Prodeskel	Inventarisasi data Propil desa dan input di Prodeskel
36	Data base kelompok miskin tidak update dengan kondisi terkini	data kelompok miskin tidak lengkap	Perangkat desa,RT,LP M,Anggaran	Pendataan Penduduk Miskin	Pendataan Penduduk wajib KTP
37	Data base prodeskel tidak update	Belum terlatih dalam pengimputan ke prodeskel	Perangkat desa	Pelatihan dan Pembinaan	Pelatihan dan Pembinaan
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
38	Kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan rapat desa dan musdes	Masyarakat tidak menghiraukan undangan karena sibuk bekerja	Masyarakat	Sosialisasi pentingnya rapat musdes	Sosialisasi pentingnya rapat musdes
39	Terlambatnya penyusunan dokumen RKPDes, APBDes, dan Pelaporan Tahunan	Penyusunan rencana kerja yang kurang disiplin	Pendampingan	Pelatihan Perangkat Desa	Pelatihan Perangkat Desa

40	Pemberitahuan yang kurang jelas dari Pemerintah desa	Papan informasi dibuat hanya untuk daerah tertentu saja	Aparat Desa, Masyarakat, LPM, BPD dan Lembaga Lainnya	Pembuatan Papan Informasi	Pembuatan Papan Informasi
	Pertanahan				
41	Kepengurusan PBB yang tidak terkoordinir	Tidak ada petugas pemungut Iuran PBB	Perangkat desa	Pembuatan Sertifikat	Pembuatan Sertifikat
42	Sertifikat belum dimiliki oleh semua masyarakat	Belum terkaper semua oleh BPN	Petugas BPN	Sosialisasi Pemungutan PBB	Sosialisasi Pemungutan PBB

**b. Alternatif tindakan pemecahan masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Tebel 21  
 Pengelompokan Bidang Pelaksanaan Pembangunan

	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
<b>2</b>	<b>2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>				
	<b>Bidang Pendidikan</b>				
1	Kurangnya keaktifan tenaga pengajar	Tenaga pengajar tinggal jauh dari sekolah	Guru, Murid	Bangun Rumah Guru	Bangun Rumah Guru
2	Tenaga Pengajar PAUD/TK tidak mendapatkan honor	Kurangnya perhatian pemerintah	Guru Paud/TK	Pemberian Insentif	Pemberian Insentif
3	Masih kurangnya bangunan Gedung PAUD Milik Desa	Jumlah anak usia dini tidak tertampung oleh PAUD yang ada di desa	Tanah Desa, Tenaga Kerja, Material Lokal, Guru PAUD	Pembangunan Gedung PAUD	Pembangunan Gedung PAUD
4	Masih Kurangnya Tenaga Pengajar PAUD yang bersertifikasi	Pelaksanaan Sertifikasi dan Pemenuhan biaya sertifikasi	Guru PAUD	Tambah Lokal Gedung PAUD	Tambah Lokal Gedung PAUD
5	Masih Kurangnya Alat Peraga Edukatif	APE yang ada sudah Rusak dan tidak	Gedung PAUD, Guru PAUD, Anggaran	Pelatihan Guru PAUD	Pelatihan Guru PAUD

		Memadai			
6	Kurangnya Budaya Membaca	Belum ada bangunan Perpustakaan Desa	Lahan, Buku bacaan, Anggaran	Penambahan APE	Penambahan APE
7	Belum Optimalnya kegiatan sanggar seni dan belajar masyarakat	Belum adanya tempat/bangunan untuk berkegiatan	Lahan, SDM, Anggaran	Bangun Taman Bacaan Desa	Bangun Taman Bacaan Desa
8	Banyak siswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan	Tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan/ operasional untuk sekolah	Anggaran, Siswa berprestasi	Pengadaan Buku Bacaan	Pengadaan Buku Bacaan
	<b>Bidang Kesehatan</b>				
9	Kurangnya Tenaga medis	Tenaga medis yang kurang	Bidan, kader posyandu	Penambahan tenaga medis	Penambahan tenaga medis
10	Sarana Posyandu belum lengkap	Keterbatasan Anggaran	Tenaga medis, kader, balita dan ibu hamil ada	Pengadaan kasur dan bantal	Pengadaan kasur dan bantal
11	Pompong khusus untuk membawa orang sakit belum ada	Keterbatasan Anggaran	Pemanfaat ada	Pengadaan Pompong khusus untuk membawa orang sakit	Pompong khusus untuk membawa orang sakit
12	Sound system posyandu belum ada	Keterbatasan Anggaran	Pemanfaat ada	Pengadaan sound system	Pengadaan sound system
13	Peralatan PMT belum lengkap	Keterbatasan Anggaran	Pemanfaat ada	Penambahan Peralatan PMT	Penambahan Peralatan PMT
14	Tidak terupdatenya data Balita Sehat, Balita kurang Gizi	Belum Optimalnya Pendataan Balita sehat, balita kurang gizi	PKK Desa, Kader Posyandu, KPM, Posyandu	Pengadaan Seragam	Pengadaan Seragam tenaga medis dan kader
15	Masih ada kejadian Balita yang Kurang Gizi	Pemberian Makanan Tambahan Belum memenuhi Kebutuhan Gizi Balita	PKK Desa, Posyandu, Kader, Hasil pertanian yang berlimpah	Pendataan Balita sehat dan Kurang Gizi	Pendataan Balita sehat dan Kurang Gizi

16	Warga masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat	Masih kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan	Kader Posyandu, PK K, Anggaran, Tenaga Kesehatan	Sosialisasi PHBS	Sosialisasi PHBS
17	Ambulan Desa	Belum Optimalnya pembiayaan untuk Operasional Ambulan desa	Ambulance Desa, Anggaran	Penambahan Biaya Operasional Ambulance	Penambahan Biaya Operasional Ambulance
18	Banyak jenis tanaman Obat dapat dijadikan obat	Belum membudaya nya penyediaan tanaman Obat tradisional	PKK Desa, Posyandu, Kader Posyandu, Anggaran	Pembuatan TOGA di pekarangan Rumah	Pembuatan TOGA di pekarangan Rumah
19	Pelayanan Posyandu belum Optimal	Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana posyandu	PKK Desa, Posyandu, Kader Posyandu, Anggaran	Penambahan sarana dan prasarana Posyandu	Penambahan sarana dan prasarana Posyandu
20	Obat-obatan gratis kurang	- Pengadaan KB Gratis - Pengadaan KB Murah	Masyarakat	Penyediaan obat-obatan gratis	Penyediaan obat-obatan gratis
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
	<b>Jalan Desa</b>				
21	Rabat Beton Jalan Poros Desa Rusak	Belum terakomodir dengan baik	DD, APBD	Rehab Jalan Desa	Rehab Jalan Desa
22	Aspal Jalan Poros Desa	Belum adanya jalan aspal	DD, APBD	Pembangunan Jalan Aspal	Pembangunan Jalan Aspal
23	Jalan sempit	Susahnya ketika bersimpangan	DD, APBD	Pelebaran Jalan	Pelebaran Jalan
24	Tepian jalan semak belukar	Tidak jelas pandangan pengguna kendaraan	DD, APBD	Penebasan	Penebasan
	<b>Jalan Lingkungan</b>				
25	Rabat Beton Jalan	Pembangunan yang masih	Semen, Pasir, Batu,	Pembangunan	Pembangunan

	Lingkungan	belum merata	Pekrja	Baru,Rehab	Baru,Rehab
26	Jalan Sempit	Susahnya ketika bersimpangan	Semen, Pasir, Batu, Pekrja	Peleberan dan Rehab	Peleberan dan Rehab
	<b>Jalan Usaha Tani</b>				
27	Jalan usaha tani belum merata	Masih minimnya dana untuk pembuatan Pembanguna n jalan	Semen, Pasir, Batu, Pekrja	Pembanguna n JUT	Pembanguna n JUT
	<b>Jembatan Desa</b>				
28	Jembatan Desa Belum Terbangun	Belum Semua jembatan desa terbangun	Semen, Pasir, Batu, Pekrja	Rehab dan Pembanguna n baru	Rehab dan Pembanguna n baru
	<b>Balai Desa</b>				
29	Balai Desa	Belum terbangunnya a Balai Desa	DD, ADD, APBD	Bangun Gedung	Bangun Gedung
	<b>Pemakaman Milik Desa/ Situs bersejarah</b>				
30	Situs Bersejarah	Masih belum terurus dengan baik	Petugas Makam, RT, RW	Pembanguna n Prasaran Makam	Pembanguna n Prasaran Makam
	<b>Embung Desa</b>				
31	Lahan pertanian pada musim kemarau kekurangan air	Minimnya Dana untuk membangun embung desa	DD, APBD	Pembanguna n Embung	Pembanguna n Embung
	<b>Gorong- gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Tembok penahan Tanah</b>				
32	Terjadi genangan air di saat musim penghujan di	Belum semua parit dan irigasi dibuatkan Gorong-	DD, APBD	Pembersihan parit dan pembanguna n gorong	Pembersihan parit dan pembanguna n gorong

	Dusun Pulau Maju	gorong			
33	Parit kampung yang masih sering sumbat saat musim penghujan	Belum Teranggarkan	DD, APBD	Pemberisiha n	Pemberisiha n
	<b>Peta wilayah Desa</b>				
34	Belum adanya batas wialayah desa	Peta wilayah desa belum akurat	Pemetaan, Kasi, Kaur	Pembuatan Peta Desa	Pembuatan Peta Desa
	<b>Tata Ruang Desa</b>				
35	Masih tumpang tindihnya pengembangan wilayah desa	Desa belum ada master plan peruntukan pengembangan wilayah desa yang mengacu dengan tata ruang kabupaten	Keanekaragaman Usaha pertanian Masyarakat, Perkembangan Jumlah Penduduk	Penyusunan Tata Ruang Desa	Penyusunan Tata Ruang Desa
	<b>Kawasan Pemukiman</b>				
	<b>Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)</b>				
36	Masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mempunyai tempat tinggal yang layak	Belum ada pendataan rumah tidak layak huni	Perangkat desa, Anggaran	Melakukan pendataan per tahun	Melakukan pendataan per tahun
	<b>Penyediaan Air Bersih bagi masyarakat</b>				
37	Penyediaan Air Bersih	Tidak semua masyarakat desa	DD, ADD, APBD	Pengadaan PAH	Pengadaan PAH

		menikmati sarana air bersih			
	<b>Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)</b>				
38	Parit lingkungan tersumbat	Belum adanya penganggara n untuk saniatsi pemukiman	DD, ADD, APBD	Pemberihan Parit	Pemberihan Parit
	<b>Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll</b>				
39	Masih banyak masyarakat buang ari besar (BAB) dengan cara menugal	Dana yang minim sehingga belum bisa deianngarka n	DD, ADD, APBD	Sosialisasi dampak BAB sembarnagan	Sosialisasi dampak BAB sembarnagan
	<b>Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permu kiman (Penampung an, Bank Sampah, dll)</b>				
40	Masyarakat masih banyak membuang sampah ke sungai	Tidak tersedianya tempat pengelolaan sampah	Tata Ruang, Pemdes, Masyarakat	Sosialisasi bahaya pencemaran lingkungan	Sosialisasi bahaya pencemaran lingkungan
	<b>Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)</b>				
41	Tidak ada pembuangan air limbah	Belum teranggarkan	DD, APBD	Pembanguna n pembuangan limbah	Pembanguna n pembuangan limbah
	<b>Taman/Tam an Bermain</b>				

	<b>Anak Milik Desa</b>				
42	Belum adanya taman bermain anak	Belum teranggarkan	DD, APBD	Pembangunan taman bermain anak-anak	Pembangunan taman bermain anak-anak
	<b>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>				
43	LPHD	Kurangnya pendanaan untuk penunjang kegiatan LPHD	LPHD, Masyarakat	Upaya bantuan dari pihak ketiga	Upaya bantuan dari pihak ketiga
	<b>Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>				
44	Internet Desa	Tidak tersedianya jaringan internet desa	Pemdes	Pemasangan Internet RT RW	Pemasangan Internet RT RW
45	Website Desa Belum Maksimal	Kapasitas pengelola yang belum mumpuni	Perangkat Desa	Pelatihan jurnalistik	Pelatihan jurnalistik
46	Masih banyak masyarakat desa yang ke saras untuk menuju ke pusat desa	Tidak adanya rambu rambu jalan menuju desa	SDM, Alat, Anggaran	Pemangan rambu-rambu	Pemangan rambu-rambu
47	Masyarakat belum banyak yang mengetahui hasil kegiatan pemdes	Belum efisien dan optimal pemberian informasi kemasyarakat ttg perencanaan kegiatan dan anggaran serta hasil pelaksanaan pembangunan desa	SDM, Alat, Anggaran	Pemasangan baleho-baleho informasi terkait pemerintahan desa	Pemasangan baleho-baleho informasi terkait pemerintahan desa
	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
48	Penerangan/ PLN	Sebagian wilayah Desa	DD dan APBD	Penambahan jaringan baru	Penambahan jaringan baru



		Kalibandung belum mendapatkan aliran listrik	Kabupaten/ Daerah		
49	Air Bersih	Belum adanya sarana ari bersih	DD dan APBD Kabupaten/ Daerah	Pembarian PAH	Pembarian PAH
	<b>Pariwisata</b>				
50	Wisata Religi	Tidak adanya akses jalan ke tempat wisata	DD dan APBD Kabupaten/ Daerah	Pembanguna n Akses Jalan	Pembanguna n Akses Jalan
51	Tempat Pemancingan	Tidak adanya fasilitas	DD, BUMDes	Pembuatan sampan sewa	Pembuatan sampan sewa

**c. Alternatif tindakan pemecahan masalah Bidang Pembinaan Masyarakat**

Tabel 22  
 Pengelompokan Masalah Bidang Pembinaan Masyarakat

	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
<b>3</b>	<b>3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
1	Belum Optimalnya peran dan fungsi Satlimas di desa	Kurangnya kapasitas Satlimas dalam pemahama n tugas dan fungsi	Satlimas, Babinkamtib mas, Babinsa, Anggaran	Pembinaan dan Pelatihan	Pembinaan dan Pelatihan
2	Tidak adanya Ronda malam di Desa	Belum ada penjadwala n ronda malam, tidak ada Pos Ronda	Lahan, SDM, Alat, Anggaran	Pembanguna n POS jaga malam, Pemberian Insentif	Pembanguna n POS jaga malam, Pemberian Insentif
3	Masih banyak terjadi kenakalan Remaja	Kurangnya sosialisasi tentang hukum dan perlindungan masyarakat	Satlimas, Babinkamtib mas, Babinsa, Anggaran	Penyuluhan dan Pembinaan	Penyuluhan dan Pembinaan
	<b>KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN</b>				

4	Adat Istiadat	Kurangnya penunjang Kegiatan adat budaya lokal	Masyrakat adat	Pembelian alat-alat penunjang kegiatan kebudaayn	Pembelian alat-alat penunjang kegiatan kebudaayn
	<b>KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA</b>				
5	Karang Taruna	Kurangnya Pelatihan Pengkadera n karang taruna	Karang Taruna	Pembinaan dan pelatihan	Pembinaan dan pelatihan
6	Stadium bola	Belum adanya tribun panitia dan penonton	Lahan ,SDM,Alat, Anggaran	Pembanguna n tribun penonton	Pembanguna n tribun penonton
	<b>KELEMBAGA AN MASYARAKA T</b>				
7	Belum Optimalnya Peran Kelembagaan yang ada di desa	Kelembaga an yang ada didesa kurang memahami Tugas dan fungsi	SDM, Kelembagaan Masy,Desa, Kecamatan, Anggaran	Sosisliasi, Pelatihan dan Pembinaan	Sosisliasi, Pelatihan dan Pembinaan

**d. Alternatif tindakan pemecahan masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Tabel 22

Pengelompokan Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
4	<b>4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
1	Perikanan air tawar	Kurangnya modal untuk pengemban gan potensi perikanan air tawar	Dinas, Pemdes	Pembuatan Kolam Pemeliharaaa n Ikan	Pembuatan Kolam Pemeliharaaa n Ikan
2	Masyarakat sulit untuk membeli ikan krn harus menunggu pedagang	Tidak adanya penjual ikan di desa	Lahan, SDM, PPL, Anggaran	Pembanguna pasar desa	Pembanguna pasar desa

	keliling				
	<b>Pertanian dan Perternakan</b>				
3	Pertanian padi unggul	Belum dilaksanakan kegiatan pertanian dengan program padi unggul	Pemdes, Petani	Penyediaan bibit padi unggul	Penyediaan bibit padi unggul
4	Kelompok Tani kurang maksimal	Tidak adanya peremajaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani	SDM, Lahan, PPL	Pelathian Poktan	Pelathian Poktan
	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>				
5	Staf desa	Kurangnya pemahaman tentang tata cara pengelolaan desa	Aparat Desa	Pelatihan Perangkat Desa	Pelatihan Perangkat Desa
6	Beberapa Anggota BPD desa belum melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya	Belum memahami akan tugas dan fungsinya	BPD,Aparatur kec, Bahan Bacaan	Pelatihan BPD	Pelatihan BPD
7	RT, RW	Kurangnya kinerja pengurus RT, RW	RT, RW	Pembinaan RT RW	Pembinaan RT RW
	<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>				
8	PKK	Kurangnya Penunjang kegiatan pkk	PKK, Kelompok Perempuan	Meningkatkan anggaran dalam APBDes	Meningkatkan anggaran dalam APBDes
9	Kelompok pengrajin	Tidak ada penunjang yang tepat untuk	Kelompok Pengrajin	Pengadaan kebutuhan, dan Pelatihan	Pengadaan kebutuhan, dan Pelatihan

		kelompok pengrajin			
	<b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>				
10	BUMDES	Program pencanangan kegiatan bumdes yang belum sesuai dengan aturan koperasi	BUMDES, anggota	Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES	Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES
	<b>Dukungan Penanaman Modal</b>				
11	Dukungan koperasi	Koperasi yang dibentuk hanya berjalan ditempat	Anggota koperasi	Pembinaan terhadap pengurus koperasi	Pembinaan terhadap pengurus koperasi
	<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>				
12	Industri kerajinan rumah tangga	Tidak ada penganggran untuk kegiatan industri rumah tannga	Pengrajin	Pelatihan pengembangan usaha	Pelatihan pengembangan usaha

## **BAB IV**

### **VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi**

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kalibandung saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk Pembangunan Desa Kalibandung pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2020-2025, disusun visi sebagai berikut :

**Terwujudnya Desa Kalibandung Sebagai Desa Yang Mandiri, berbasis Ekologis, Berkepribadian, Berbudaya, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) **Desa Yang Mandiri** mengandung pengertian bahwa Desa Kalibandung mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan pemenuhan sarana dan prasarana Dasar Masyarakat mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal dengan pemanfaat sumber daya yang dimiliki.
- b) Sedangkan yang dimaksud Desa **Berbasis Ekologis** adalah sebuah sistem kelola wilayah perdesaan yang integratif dan partisipatif baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- c) **Berkepribadian** mengandung pengertian bahwa Desa Kalibandung berorientasi pada proses untuk mencapai keberhasilan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan
- d) **Berbudaya** mengandung pengertian bahwa Desa Kalibandung dalam kehidupan bermasyarakat menjunjung norma norma/ tata aturan / adat istiadat yang sudah berlaku turun temurun
- e) Adapun yang dimaksud **Masyarakat Yang Sehat** adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.

- f) Sedangkan yang dimaksud dengan **Masyarakat Yang Cerdas** adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- g) Yang dimaksud **Masyarakat Yang Lebih Sejahtera** adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram)

## **B. Misi**

Misi adalah penjabaran rencana aksi untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good and Clean governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Sosial Dasar menuju Kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
4. Meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan alam dengan pendekatan ekologis serta meningkatkan pembangunan desa menuju masyarakat desa yang siap dan tanggap darurat bencana.
5. Meningkatkan Kualitas dan Peran Kelembagaan Desa berbasis Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan Desa.

## **C . Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan enam tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Desa Kalibandung periode 2019 -2025:

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan Visi dan Misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran dari RPJMDesa periode 2020-2025 sebagai berikut :

**Misi 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Bersih dan Berwibawa (good and clean governance)**

**Tujuan :**

1. Meningkatkan dan pengembangan pelatihan aparatur desa.
2. Meningkatkan budaya kerja dan tata Kelola pemerintahan bersih, efektif, efisien, dan berwibawa.

**Sasara :**

1. Meningkatkan aparatur desa yang sesuai dengan kompetensi.
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan kebijakan pengembangan percepatan sistem pemerintahan desa berbasis elektronik (*one data-one enrty-one solution*).
4. Meningkatkan ruang kerjasama dan kemitraan (*government to goverments, government to corporation, dan government to non government organization*).
5. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

**MISI 2: Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.**

**Tujuan :**

1. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha produktif yang difokuskan pada pengembangan produk unggulan desa.
2. Meningkatkan usaha Jasa industri kecil/usaha rumahan masyarakat.
3. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan wisata Desa.

**Sasaran:**

1. Meningkatkan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikan masyarakat.
2. Meningkatkan produk unggulan Desa.
3. Meningkatkan keterampilan pelaku usaha jasa industri/usaha rumahan kelompok masyarakat.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana usaha kelompok masyarakat.

5. Meningkatkan jaringan pemasaran hasil produksi usaha jasa industri kecil /usaha rumahan kelompok masyarakat.
6. Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa berbasis potensi desa.
7. Meningkatkan pengembangan potensi ekowisata.
8. Meningkatkan pembangnan sarana dan prasaran Energi.

**MISI 3: Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Sosial Dasar menuju kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.**

**Tujuan :**

1. Meningkatnya Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Sarana prasarana Kesehatan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan.
4. Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan sarana Transprtasi Desa.
5. Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan sarana Informasi dan komunikasi Desa.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya sarana prasarana posyandu
2. Meningkatnya sarana prasarana Poskesdes
3. Meningkatnya penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
4. Meningkatnya pelayanan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita Sehat dan kurang gizi
5. Menurunnya angka kematian ibu bayi
6. Meningkatnya harapan hidup bagi lansia
7. Meningkatnya Desa Siaga Kesehatan
8. Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan Desa
9. Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini
10. Meningkatnya budaya membaca di desa
11. Menurunkan jumlah angka stunting
12. Tersedianya data kesejahteraan sosial

**MISI 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup Desa menuju masyarakat yang siap dan tanggap darurat bencana**

**Tujuan :**

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.



2. Meningkatnya kesiapan siaga tanggap bencana desa.
3. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan hutan desa.
4. Meningkatkan pemahaman akan bahaya Narkotika.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar terkait dengan pembangunan desa berbasis ekologis.
6. Adanya penatagunaan lahan melalui pendekatan partisipatif.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kegiatan pencegahan bencana.
3. Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
4. Meningkatnya kapasitas tata kelola Lembaga Pengelola Hutan Desa.
5. Meningkatkan masyarakat Desa Kalibandung yang bebas bahaya Narkotika.
6. Meningkatnya pelestarian ekosistem lahan gambut.
7. Meningkatnya perlindungan dan pelestarian biodiversity di desa.
8. Meningkatnya pengelolaan agroforestry berkelanjutan.
9. Meningkatkan perencanaan partisipatif penatagunaan lahan desa.
10. Berkurangnya rumah yang tidak layak huni.
11. Meningkatnya embung dan pertanian.
12. Tersedianya peta wilayah desa.
13. Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah desa.

**MISI 5 : Meningkatkan Kualitas dan Peran Kelembagaan Desa berbasis Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan Desa**

**Tujuan :**

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa.
2. Membangun tata kelola kelembagaan desa.
3. Meningkatkan peran kelembagaan desa dalam pembangunan desa.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap perlindungan ibu dan anak.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa.
2. Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam pembangunan desa.
3. Membangun pengetahuan tata kelola kelembagaan desa.
4. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
5. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak.

6. Tersedianya Balai Kemasyarakatan Milik Desa.

#### **D. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa**

##### **a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Kalibandung**

Untuk mewujudkan visi dan misi desa Kalibandung maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan desa Kalibandung untuk enam (6) tahun kedepan yang akan di implementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam setiap tahunnya selama periode tahun 2020 -2025 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good and Clean governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan sarana dan prasarana Desa Berbasis Kemampuan Lokal Desa.
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Sosial Dasar menuju Kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
4. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
5. Meningkatkan pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan sarana prasarana Lingkungan Hidup Desa menuju masyarakat yang siap dan tanggap Bencana
6. Meningkatkan Kualitas dan Peran Kelembagaan Desa berbasis Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan Desa
7. Meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan alam dengan pendekatan ekologis

##### **b. Prioritas Pembangunan Desa**

Program dan kegiatan untuk periode pembangunan tahun 2020-2025 diutamakan untuk memperbaiki infrastruktur desa Kalibandung dalam Bab III menunjukkan bahwa point B Permasalahan Desa masih banyak kondisi prasarana jalan antar dusun, antar desa serta jalan lingkungan dalam kondisi rusak, selain itu mengingat sumber daya manusia yang cukup banyak sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya desa. Sementara dalam uraian Bab III menunjukkan bahwa banyak potensi desa Kalibandung yang belum ditangani dengan baik.

Desa Kalibandung berharap memperbaiki berbagai strategi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada meningkatkan disiplin dan kualitas layanan warga, pelaksanaan pembangunan yang mendukung

terlibatnya sebanyak mungkin masyarakat pra sejahtera, pembinaan dan pengembangan peran organisasi warga untuk mendukung pembangunan desa Kalibandung dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang khususnya yang mendukung basis komoditas desa Kalibandung di bidang pertanian dan perkebunan.

#### **a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, Prioritas Pembangunan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
4. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
5. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
6. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
7. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
9. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
10. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
12. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
13. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
14. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
15. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
16. Pengembangan website Desa sebagai basis informasi

17. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
18. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
19. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
20. Sertifikasi Tanah Kas Desa
21. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
22. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
23. Mediasi Konflik Pertanahan
24. Penyuluhan Pertanahan
25. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
26. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa

**b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa\*\*
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
11. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa;

- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
12. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
  13. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
  14. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  15. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
  16. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  17. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
  18. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
  19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
  20. Pemeliharaan Jalan Desa
  21. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
  22. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  23. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
  24. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Tembok penahan Tanah, Prasarana Jalan lain)
  25. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
  26. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
  27. Pemeliharaan Embung Milik Desa
  28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
  29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
  30. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
  31. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
  32. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Tembok penahan Tanah, lain)
  33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
35. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
36. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
38. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
39. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
40. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
41. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
42. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
43. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
44. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
45. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
46. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
47. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
48. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
49. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) \*\*
50. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
51. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll \*\*
52. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)\*\*
53. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)\*\*
54. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa\*\*
55. Pengelolaan Hutan Milik Desa
56. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
57. Penanggulangan bencana

58. Konservasi dan restorasi lahan gambut
59. Penandaan batas desa
60. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
61. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
62. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
63. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
64. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
65. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
66. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
67. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
68. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
69. Pengembangan Agroforestry berkelanjutan

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
2. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
4. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
5. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
6. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
7. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
8. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

12. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
13. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
14. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa\*\*
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa\*\*
17. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
18. Pembinaan Lembaga Adat
19. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
20. Pembinaan PKK
21. Pembinaan Lembaga Pengelola Hutan Desa
22. Pembinaan kelompok usaha produktif perempuan
23. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
7. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
8. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
9. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
10. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
11. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
12. Peningkatan kapasitas kepala Desa
13. Peningkatan kapasitas perangkat Desa



14. Peningkatan kapasitas BPD
15. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
16. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
17. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
18. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
19. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
20. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
21. Peningkatan kapasitas LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa)
22. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
23. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
25. Pengembangan Industri kecil level Desa
26. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif responsif gender (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) \*\*

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kalibandung tahun 2020-2025. merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa Kalibandung selama 6 ( enam ) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2010-2024.

RPJM Desa Kalibandung tahun 2020-2025 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kalibandung

#### Kaidah Pelaksanaan

RPJM Desa Kalibandung tahun 2020-2025. yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Kalibandung berkewajiban untuk mensosialisasikan RPJMDesa ini kepada semua elemen masyarakat.
2. Seluruh lembaga di wilayah Desa Kalibandung serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Desa tahun 2020-2025 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Desa Kalibandung Tahun 2020-2025 perlu dilaksanakan Evaluasi Tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pelaksanaan Kegiatan untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Desa Kalibandung

Akhirnya semoga RPJM Desa Kalibandung dapat menjadi Acuan semua elemen masyarakat secara bersamama dengan dukungan pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Pusat untuk mensukseskan pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penanggulangan Bencana menuju Desa Kalibandung **“Yang Mandiri, Berbasis Ekologis, Berkepribadian, Berbudaya, Sehat, Cerdas dan Sejahtera.”**



**SANHAJI**